

SKRIPSI
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
(SENTRA : UMKM PANDAI BESI)

Disusun dan diajukan oleh :

KURNIAWAN DWI YULIANTO WAFIER

E121 15 310



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM SARJANA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(SENTRA : UMKM PANDAI BESI)

Disusun dan diajukan oleh :

KURNIAWAN DWI YULIANTO WAFIER

E121 15 310

Telah dipertahankan dalam Seminar Proposal

pada tanggal 14 Juni 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
NIP. 19570707 198403 1005

Dr. A. Lukman, S.IP, M.Si.
NIP. 19790106 200501 1001

Mengetahui,

Ketua Departemen

Manajemen Pemerintahan



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
NIP. 19750818 200801 1 008

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN**

SIDENRENG RAPPANG

(SENTRA : UMKM PANDAI BESI)

Dipersiapkan dan disusun oleh

KURNIAWAN DWI YULIANTO WAFIER

E121 15 310

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Juni 2022

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.

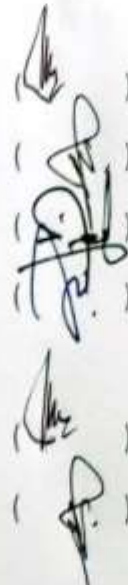
Sekretaris : Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si.

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Anggota : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.

Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si.



**PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurniawan Dwi Yulianto Wafier

NIM : E121 15 310

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul :

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
(SENTRA : UMKM PANDAI BESI)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 10 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Kurniawan Dwi Yulianto Wafier

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji kepada Allah SWT, pemilik kebesaran dan keagungan alam semesta atas karunia ilmu, semangat, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul **“STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, SENTRA : UMKM PANDAI BESI”**, yang merupakan syarat akhir dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang telah memberikan berbagai macam bentuk bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga tercurahkan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Muh. Wafier, Ibunda Nurhayati, serta kakak dan adik-adik penulis atas kasih sayang dan segala pengorbanan dalam merawat dan mendidik penulis sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi selanjutnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini :

- a. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
- b. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
- c. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberi banyak bantuan dan kesempatan melalui ilmu, didikan hingga kepada penanganan administrasi kepada penulis hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
- d. Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini serta Bapak Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II. Terimakasih atas berbagai bimbingan dan

arahan berupa wawasan, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

- e. Kepada Tim Penguji, Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si. yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
- f. Segenap dosen, tenaga pengajar dan staf administrasi program studi Ilmu Pemerintahan, atas wawasan, ilmu, waktu, serta arahan dalam melaksanakan proses perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
- g. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Seksi Usaha dan Promosi UMKM Kabupaten Sidenreng Rappang karena telah berbagi waktu, informasi dan wawasan sesuai dengan judul skripsi penulis.
- h. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Dahlia, Bapak Syamsuddin, Bapak Sultan, dan Bapak Rusdi sebagai pelaku UMKM Pandai Besi Kabupaten Sidenreng Rappang atas kesediaannya membagi waktu dan wawasan yang mendukung penyusunan skripsi penulis.
- i. Terimakasih kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan 2015 “Federasi” (Alm) Putu Eka Satria, A. Batara, Dedi, Jannah, Nawir, Fahrul, Eka, Dela, Pia, Nunu, Mita, Wardah, Zatri, Mirna, Risda, Riska, Fika, Ica, Fani, Nadira, Aul, Alya, Griaz, Ulfa, Ismet, Feri, Sigit, Eva, Thahir, Anto, Hasbi, Yusran, Tunru, Ilo, Fahri, Tino, Wowo, Ito, Ahmad, Nuge, Idham, Arfah, Ikhsan, atas berbagai

kebersamaan dan pertemanan yang diberikan semenjak awal masuk perkuliahan hingga saat ini. Semoga kebersamaan kita akan tetap terjalin baik.

- j. Keluarga Besar Himapem FISIP Unhas, dari “Enlightment” 2011, “Fraternity” 2012, “Lebensraum” 2013, “Fidelitas” 2014, hingga dari “Verenigen” 2016, “Kaizen” 2017, “Eleftheria” 2018 dan “Zeitgeits” 2019. Terima kasih atas kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan dan pengalaman yang penulis peroleh selama berada dalam Himapem ketika menjadi bagian dalam kepengurusan. Semoga Himapem FISIP Unhas senantiasa memperbaharui diri ke arah yang lebih baik.

Terakhir, atas motivasi dan dukungan selama menjadi mahasiswa dari berbagai pihak universitas, kawan-kawan mahasiswa serta keluarga penulis yang tidak disebutkan, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Makassar, 25 Oktober 2021

Kurniawan Dwi Yulianto Wafier

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i	
LEMBAR PENGESAHAN	ii	
LEMBAR PENERIMAAN	iii	
PERNYATAAN KEASLIAN	iv	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI.....	ix	
DAFTAR GAMBAR.....	xi	
DAFTAR TABEL.....	xii	
ABSTRAK.....	xiii	
ABSTRACT	xiv	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah..... 1	
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian.....	8
	D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Strategi.....	10
	B. Manajemen Strategi	15
	1. Pengertian Manajemen Strategi.....	15
	2. Tujuan Manajemen Strategi	15
	3. Manfaat Manajemen Strategi	16
	C. Perencanaan Strategi.....	18
	D. UMKM	19
	1. Pengertian UMKM.....	19
	2. Karakteristik UMKM	21
	E. Pemberdayaan UMKM	27
	F. UMKM Pandai Besi	29
	G. Kerangka Berpikir.....	29
	H. Definisi Operasional	34
	I. Kajian Terdahulu	39

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	44
	B. Lokasi Penelitian	44
	C. Subjek Penelitian.....	45
	D. Teknik Pengumpulan Data	46
	E. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Menengah, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	
	a. Struktur Organisasi.....	49
	b. Visi-Misi.....	51
	c. Sasaran dan Tujuan Dinas	52
	d. Rencana Strategis dan Arah Kebijakan ..	53
	e. Rencana Program dan Kegiatan	55
	2. Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap	
	a. Gambaran Umum Wilayah	59
	b. UMKM Pandai Besi di Kec.Tellu Limpoe	61
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
	a. Fase Inisial	64
	b. Fase Partisipatoris.....	68
	c. Fase Emansipatoris.....	70
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....	33
Gambar IV.1 Visi Diskopukm Nakertrans Kab. Sidrap	51

DAFTAR TABEL

Tabel. I.1 Jumlah Angkatan Kerja di Kab. Sidrap	3
Tabel. I.2 Jumlah UMKM Pandai Besi Ta. 2017-2020.....	7
Tabel. II.1 Karakteristik UMKM	23
Tabel. II.2 Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omset.....	24
Tabel. II.3 Kajian Terdahulu	39
Tabel. IV.1 Tujuan & Sasaran Strategis Diskopukm.....	52
Tabel. IV.2 Renstra & Arah Kebijakan Diskopukm	54
Tabel. IV.3 Program &Kegiatan Diskopukm Nakertrans.....	57
Tabel. IV.4 Tabel Capaian Kinerja Diskopukm Nakertrans.....	65

ABSTRAK

KURNIAWAN DWI YULIANTO WAFIER. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasannudin, menyusun Skripsi dengan Judul : **Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sentra : UMKM Pandai Besi (Dibimbing oleh Prof. Dr. Nurlinah, M.Si dan Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam memberdayakan UMKM pandai besi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang strategi pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan pada konsep pemberdayaan menurut Pranarka dan Priyono, yaitu fase inisial, partisipatoris, dan emansipatoris. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara dan observasi pada lokasi dan juga berdasarkan dokumen.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah secara umum yang dirumuskan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah diimplementasikan sesuai tanggung jawab, namun pada usaha pandai besi pada khususnya, strategi-strategi tersebut tidak berjalan secara optimal. Proses pemberdayaan UMKM pandai besi tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat terlaksananya pengembangan usaha tersebut.

Kata Kunci : *Strategi, Pemberdayaan, UMKM, Pandai Besi.*

ABSTRACT

KURNIAWAN DWI YULIANTO WAAFIER, Government Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Preparing thesis with title “The Strategies of Local Government in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sidenreng Rappang Regency (Blacksmith SMEs), under the guidance of Prof. Dr. Nurlinah, M.Si. as the 1st mentor and Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si., as the 2nd mentor.

This study aims to identify and analyze the strategy of the local government in this case the Department of Cooperatives, SMEs, Manpower, and Transmigration in empowering the blacksmith SMEs in Sidenreng Rappang Regency.

The method which is used in this research is a qualitative descriptive type, which is intended for exploration and clarification of a phenomenon or social reality, by describing data and facts relating to the problem . This study aims to provide a description of the MSME empowerment strategy by the local government of Sidenreng Rappang Regency based on the concept of empowerment according to Pranarka and Priyono, the initial, participatory, and emancipatory phases. The data was collected from the interviews and observations at the location and also based on documents.

The results of the research indicate that the strategy of the Department of Cooperatives, SMEs, Manpower, and Transmigration of Sidenreng Rappang Regency for empowering micro, small and medium enterprises in general has been implemented according to responsibilities, but in the blacksmith enterprises in particular, these strategies not running optimally. The process of empowering the blacksmith SMEs is still faced with various problems that hinder the implementation of the business development.

Keywords: Strategy, Empowerment, UMKM, Blacksmith.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam menghadapi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik, yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha baik usaha besar maupun usaha kecil menengah.

Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 defenisi usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Dalam Undang- undang tersebut juga disebutkan bahwa keberadaan UMKM dan pengelolaannya oleh pemerintah dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu entitas pelaku ekonomi yang eksistensinya mendominasi terhadap perekonomian bangsa, baik diperkotaan maupun pedesaan. Menurut Urata (2000), tentang peran UMKM dilihat dari kedudukannya yaitu sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, seperti penyedia lapangan kerja terbesar, berperan dalam hal pengembangan kegiatan

ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan inovasi, dan untuk UMKM yang sudah mampu melakukan perdagangan internasional UMKM tersebut tentu mampu memberikan sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor.

Dilihat dari kedudukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional yang sangat penting, terutama karena jumlahnya yang banyak serta perannya terhadap penyerapan tenaga kerja yang begitu besar dan kontribusinya terhadap PDRB nasional. Disamping itu UMKM juga memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap krisis ekonomi, sebagaimana pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997- 1998an, dimana kondisi waktu itu usaha kecil, mikro, dan menengah terbukti lebih kebal daripada perusahaan besar yang justru banyak mengalami kebangkrutan.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sebesar 301.972 jiwa untuk data tahun 2019. Dengan jumlah tersebut, maka jumlah angkatan kerja juga akan besar .

Tabel I.1 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja (Jiwa)		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
	2019	2019	2019
Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	-
Tidak/Belum Tamat SD	51264	18201	69465
Sekolah Dasar	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama	24707	475	25182
Sekolah Menengah Atas	17969	1731	19700
Sekolah Menengah Kejuruan	7219	884	8103
Diploma I/II/III/Akademi	1920	256	2176
Universitas	14764	716	15480
Jumlah			140106

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tenaga kerja di kabupaten Sidenreng Rappang mayoritas berpendidikan SLTP ke bawah, yaitu sebesar 49,68 persen, tamat SLTP sebesar 17,97 persen, tamat SLTA sebesar 19,84 persen, Diploma I/II/III/Akademi sebesar 1,55 persen dan perguruan tinggi sebesar 11,05 persen. Hal ini akan menimbulkan tingginya pengangguran sebagai akibat dari tidak tertampungnya tenaga profesional dengan keahlian khusus.

Alternatif dari permasalahan ini adalah pemberdayaan UMKM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

UMKM memegang peran penting saat ini, dimana UMKM dapat memberikan lapangan pekerjaan secara langsung bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hanya saja banyak permasalahan yang kerap menjadi faktor penghambat bagi perkembangan UMKM . Secara umum pada UMKM permasalahan yang terjadi dalam mengembangkan usahanya adalah kurangnya pembinaan, kurangnya informasi tentang aksesibilitas memperoleh modal dari Bank, tingkat suku bunga kredit yang tinggi, dan diperlukannya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Selain itu permasalahan yang dialami oleh UMKM adalah teknik produksi, pemasaran, manajemen dan teknologi, begitu pula dengan UMKM yang terdapat pada Kabupaten Sidenreng Rappang.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat sentra UMKM pandai besi (pallanro atau panre besi), tepatnya di Kecamatan Tellu Limpoe. Produksinya tidak hanya dipasarkan di Sulawesi, tetapi juga Kalimantan, Papua, dan daerah lainnya di Indonesia. Hampir seluruh warga desa setempat menekuni profesi sebagai pandai besi. Para pengrajin besi ini bisa memproduksi rata-rata 289.950 buah per bulan. Seperti parang, pisau, sabit, cangkul, dan alat-alat pertanian.

Kendala utama yang dihadapi pengrajin pandai besi ini adalah bahan baku serta peralatan yang masih tradisional, permodalan biaya produksi, bahan mentah yang sulit diperoleh. Belum lagi para pandai besi dihadapkan dengan persaingan pasar dimana mereka bersaing dengan

hasil produksi pabrikan yang dijual di toko-toko. Hasil produksi pabrikan tersebut lebih variatif bentuk dan modelnya. Selain itu, kendala yang dihadapi pengrajin pandai besi adalah lemahnya tingkat SDM para perajin dan lemahnya organisasi serta kesatuan para perajin pandai besi sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Kendala lain yang dihadapi pengrajin pandai besi adalah masih belum mampu memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi khususnya dalam hal penggunaan media teknologi untuk memasarkan produk yang mereka miliki serta teknologi dalam penggunaan peralatan produksi yang modern. Lemahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh para perajin sehingga produk yang dihasilkan terkesan monoton (kurang kreatifitas atau diversifikasi produk), sehingga desain dan sentuhan teknologi yang digunakan sulit mengakses pasar lokal maupun regional. Kelemahan lainnya adalah kesulitan dalam mengakses kebutuhan bahan baku logam sehingga menyebabkan banyak perajin yang gulung tikar dan beralih untuk menggeluti profesi lain. Para pengrajin pandai besi juga mengeluhkan kurangnya modal yang mereka miliki, para perajin hanya tergantung pada modal internal bahkan kebanyakan dari perajin meminjam dana pada pengumpul (pembeli produk) sehingga harga ditentukan oleh pengumpul disebabkan tidak dapat mengakses kredit dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan banyaknya persyaratan yang ditentukan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang berada di setiap Daerah di Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2016 Bab IV tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dijelaskan bahwa Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan promosi usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan , yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi,
- b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perluasan akses dan jaringan pola kemitraan bidang usaha skala mikro, kecil, dan menengah,
- c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penumbuhan iklim usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi pendanaan, penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan

kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi dan perlindungan usaha.

Pada dasarnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah melaksanakan strategi untuk mengembangkan UMKM. Namun realita menunjukkan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal dalam mengatasi banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Hal tersebut terbukti dengan menurunnya jumlah pelaku usaha pandai besi tiap tahunnya.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Pandai Besi Tahun 2017-2020

Jenis Usaha	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Pandai Besi	257	245	228	210

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang berupa :

- a. Bagaimana strategi pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah sentra pandai besi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang?
- b. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sentra pandai besi di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam memberdayakan UMKM pandai besi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan tercapainya tujuan tersebut maka peneliti berharap dapat menambah wawasan dan konsep, dalam strategi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pandai besi dan UMKM lain pada umumnya.

D. Manfaat

1. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi pemberdayaan UMKM dan teori – teori yang berkaitan.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan Akademi, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai strategi pemberdayaan.
3. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat digunakan untuk mengetahui isu-isu permasalahan terkait UMKM pandai besi dan tingkat pencapaian kinerja.
4. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi setiap pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha untuk menambah omzet yang mereka dapatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratus* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut KBBI Strategi /stra-te-gi/ /stratégi/ *n* adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Pada awalnya konsep strategi di definisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Konsep generik ini terutama sesuai dengan perkembangan awal mula penggunaan konsep strategi yang digunakan dalam dunia militer.

Strategi saat ini sudah menjadi perbincangan yang sangat umum dan didefinisikan sedemikian rupa untuk kepentingan perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Makna yang terkandung dalam strategi adalah sekumpulan tindakan yang dirancang untuk menyesuaikan antara kompetensi perusahaan dan tuntutan eksternal pada satu industri.

Berikut ini diberikan beberapa definisi dari konsep strategi, diantaranya:

1. Menurut Kenneth R. Andrews, strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk

yang sesuai kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan. Pada dasarnya, perusahaan menetapkan strategi melalui penyelarasan kemampuan perusahaan dengan peluang yang ada dalam industri.

2. Menurut Clausewitz, strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang
3. Menurut Chandler dan Andrews, dimana strategi dalam pengertian ini mencakup juga penetapan berbagai tujuan serta arah perusahaan dalam jangka panjang.
4. Menurut Carl Von Clausewitz (Carl Philipp Gottfried) (1780-1831) Strategi merupakan penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan ("the use of engagements for the object of war").
5. Menurut Craig & Grant (1996), Strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (targeting and long-term goals) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (achieve the goals and objectives).
6. Menurut Johnson and Scholes, strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

7. Menurut Stephanie K. Marrus, Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
8. Menurut Hamel dan Prahalad, strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.
9. Menurut David (2004), strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pemberdayaan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture.
10. Menurut Glueck dan Jauch (1989), strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegritas yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.
11. Menurut Pearce & Robinson, Strategi adalah “rencana main” suatu perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan dan dimana ia harus bersaing menghadapi lawan serta dengan maksud dan tujuan apa.

Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler, menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep – konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Distinctive Competence*: tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.
2. *Competitive Advantage*: kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya.

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe, diantaranya:

1. Strategi Manajemen

Strategi manajemen merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai cara pelaksanaannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pemberdayaan strategi secara makro. Misalnya strategi

pemberdayaan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pemberdayaan pasar dan sebagainya.

2. Strategi Investasi

Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan lain sebagainya.

3. Strategi Bisnis

Strategi bisnis sering juga disebut dengan strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi, strategi operasional, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Sejalan dengan perkembangan konsep manajemen strategik, strategi tidak di definisikan hanya semata-mata sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan karena strategi dalam konsep manajemen strategik mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri (melalui berbagai keputusan startegik (*strategic decision*) yang dibuat oleh manajemen perusahaan) yang diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan bersaing perusahaan.

B. Manajemen Strategi

1. Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan di implementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

Pengertian manajemen strategi menurut beberapa ahli:

- a) Wheelen, manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan- keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah pada penyusunan strategi-strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan analisis S.W.O.T
- b) Pearce II dan Robinson, manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.
- c) Roudledge Schuler.RS, manajemen strategi adalah titik temu yang dirumuskan suatu organisasi antara sumberdaya dan keahlian internalnya dan kesempatan serta resiko yang terbentuk melalui lingkungan eksternalnya.

2. Tujuan Manajemen Strategi

- a) Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.

- b) Selalu memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan dan menjawab lingkungan eksternal yang selalu berubah, akan berubah dan terus akan berubah.
- c) Melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen dan mengusahakan selalu ada *product development*.
- d) Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
- e) Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.

3. Manfaat Manajemen Strategi

- a) Dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan lebih cepat dan lebih tepat
- b) Menjadi lebih peka dalam menjawab ancaman yang datang dari luar perusahaan
- c) Membuat keputusan terbaik dikarenakan interaksi kelompok mengumpulkan berbagai strategi yang lebih besar
- d) Kerjasama dalam tim karyawan di dalam perumusan strategi akan dapat memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi dan dengan demikian dapat mempertinggi motivasi kerja mereka.

- e) Organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi akan lebih profitable (menguntungkan) dan lebih berhasil daripada yang tidak menerapkannya.

Dalam bukunya berjudul *Strategic Management*, John A Pearce II dan Richard B Robinson, Jr diterjemahkan oleh Agus Maulana dalam buku Manajemen Strategik, memeringkat manfaat manajemen strategik:

- a. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan perusahaan mencegah masalah. Manajer yang mendorong bawahannya untuk menaruh perhatian pada perencanaan dibantu dalam melaksanakan tanggung jawab pemantauan dan peramalan oleh bawahan yang menyadari perlunya perencanaan strategik.
- b. Keputusan strategik yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada. Proses manajemen strategic menghasilkan keputusan yang lebih baik karena interaksi kelompok menghasilkan strategi yang lebih beragam dan arena peramalan yang didasarkan pada bermacam-macam spesialisasi anggota kelompok meningkatkan kemampuan menyaring pilihan.

- c. Keterlibatan karyawan dalam strategi meningkatkan pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas-imbalance di setiap rencana strategik dan dengan demikian mempertinggi motivasi mereka.
- d. Senjang dan tumpang tindih kegiatan di antara individu dan kelompok berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas adanya perbedaan peran masing-masing.
- e. Penolakan dalam perubahan berkurang. Meskipun para peserta dalam perumusan strategi mungkin tidak lebih senang dengan keputusan mereka sendiri ketimbang jika keputusan diambil secara otoriter, kesadaran mereka yang lebih besar akan parameter-parameter yang membatasi pilihan membuat mereka lebih mau menerima keputusan ini.

C. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi atau *strategic bussiness planning* adalah pendekatan secara teratur dan pragmatis yang dapat digunakan organisasi, baik publik maupun swasta dalam pembuatan keputusan saat ini untuk masa depan. Perencanaan strategi adalah proses pengkaji diri, penetapan tujuan, pemberdayaan strategi dan monitor kerja. Perencanaan strategi ini akan melahirkan fokus yang akan menuntun organisasi dari sekarang sampai keadaan yang ditargetkan untuk masa depan.

Jika dirumuskan secara sederhana, perencanaan strategi adalah sebuah alat manajemen dan sama dengan setiap alat manajemen, alat itu hanya digunakan untuk satu maksud saja, menolong organisasi memfokuskan visi dan prioritasnya sebagai jawaban terhadap lingkungan yang berubah dan memastikan agar anggota-anggota organisasi itu bekerja ke arah tujuan yang sama.

Pendek kata, perencanaan strategi adalah proses sistemik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara *stakeholder* utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Perencanaan strategi khususnya digunakan untuk mempertajam fokus organisasi, agar semua sumber organisasi digunakan secara optimal untuk melayani misi organisasi itu

D. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

1. Pengertian UMKM

UMKM didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda tergantung pada aspek-aspeknya.

Di Indonesia, terdapat beberapa definisi UMKM berdasarkan lembaga yang mendefinikannya, diantaranya :

- a) Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 - 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:
- 1) Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang.
 - 2) Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

c) Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi UMKM, diantaranya adalah:

- 1) Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.
- 2) Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pemberdayaan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu:
 - a) Industri manufaktur
 - b) Agribisnis
 - c) Bisnis kelautan
 - d) Sumber daya manusia

Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pemberdayaan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk memwadahi program prioritas dan pemberdayaan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat

2. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi

ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha – usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah diantaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, terkelola dengan tidak baik, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang)
2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang)
3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima

UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.

- b) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.

c) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Tabel II.1 Karakteristik UMKM

Ukuran usaha	Karakteristik
Usaha kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti • Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat. • Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun • Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha • Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai • Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah • Umumnya belum akses pada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank • Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP <p>Contoh: Pedagang kaki lima dan pedagang di Pasar</p>
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah • Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. • Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. • Sudah membuat neraca usaha • Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP • Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha • Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.

	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>bussiness planning</i> <p>Contoh : Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya</p>
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga Sudah memiliki persyaratan akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih <p>Contoh : Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmet buatan</p>

Sumber : Bank Indonesia

Tabel II.2

Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp.50 juta	Maksimal Rp. 300 juta
Usaha kecil	Lebih dari Rp.50 juta – Rp. 500 juta	Lebih dari Rp. 300 juta – Rp. 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 500 juta – Rp. 10 miliar	Lebih dari Rp. 2,5 miliar – Rp. 50 miliar

Sumber : Bank Indonesia

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

1. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade* sehingga standar kualitasnya beragam.
2. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
3. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.
4. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
5. Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
6. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, kriteria UMKM adalah:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

E. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Edwin B. Flippo mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut. "Pemberdayaan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh". Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut: " pemberdayaan mengacu pada staf atau personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum".

Pemberdayaan dan pembinaan UMKM perlu dilakukan untuk menumbuh- kembangkan UMKM di Indonesia menjadi UMKM yang kuat dan tangguh menghadapi segala situasi perekonomian. Pemberdayaan sektor UMKM bertumpu pada mekanisme pasar yang sehat dan adil. Pihak yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan dan pembinaan UMKM adalah pemerintah, badan usaha dan masyarakat.

Imsar menyatakan bahwa pemberdayaan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produk dari kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga dan badan untuk mencapai tujuan.

Sementara kaitannya dengan pemberdayaan sektor UMKM ini, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan usaha dalam bidang :

1. Produksi dan pengolahan
2. Pemasaran
3. Sumber Daya Manusia
4. Desain dan Teknologi

F. UMKM Pandai Besi

Industri pandai besi merupakan suatu usaha perorangan yang bergerak dibidang pertukangan besi. Seseorang yang menunjukkan perannya dan terbukti kemahirannya, biasanya diakui pakar di dalam bidang tersebut. Kemahiran pandai besi pada awalnya tertumpu pada pembuatan senjata-senjata tradisional seperti keris, parang dan pedang yang diturunkan secara turun temurun yang melibatkan segala potensi yang ada di dalam keluarganya dan masyarakat sekitar. Namun, pada perkembangannya terjadi peralihan dari pembuatan senjata tradisional ke alat-alat pertanian/ perkebunan.

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi industri pandai besi dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat tempat industri pandai besi itu berada. Keberhasilan dalam menekuni usaha pandai besi ini ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya manajemen usaha, pemasaran dan teknologi. Melalui manajemen yang baik, maka pemilik industri pandai besi tersebut akan mampu mengatasi kendala-kendala produksi yang ditemui, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil usaha.

G. Kerangka Berpikir

Dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu fungsi yang dijalankan pemerintah yakni pemberdayaan. Dalam fungsi pemberdayaan, pemerintah melakukan berbagai inovasi dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai penggerak disertai sumber

daya alam sebagai pendukung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan dalam mengimplementasikan fungsi pemberdayaan adalah mengatur perekonomian rakyat. Hal tersebut dianggap penting karena dengan adanya sistem perekonomian rakyat, diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan keleluasaan pada rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang terwujud pada pembentukan UMKM. Seiring dengan pertumbuhan UMKM yang begitu tinggi maka akan berdampak dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan daya saing, produktifitas dan pemberdayaan potensi UMKM seharusnya merupakan gerakan bersama antar berbagai pihak, namun pemerintah memegang peranan terbesar dalam upaya tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM telah diatur jelas dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu daerah dengan sebuah potensi yakni jumlah UMKM yang besar, dengan tumbuhnya iklim usaha yang baik maka akan mendorong pada perbaikan ekonomi.

Para pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya sentra pandai besi harus mampu menghadapi semua tantangan dalam hal permodalan, perizinan, pemasaran, dan lain lain. Maka dalam penelitian ini penulis akan mengacu pada konsep Pranarka dan Priyono tentang tiga fase penggolongan pemberdayaan masyarakat atau kelompok untuk menganalisis strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dan hambatan yang ditemui dalam proses pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya pelaku UMKM pandai besi guna terwujudnya pelaku usaha yang terberdaya

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses paling tidak terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumberdaya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan.

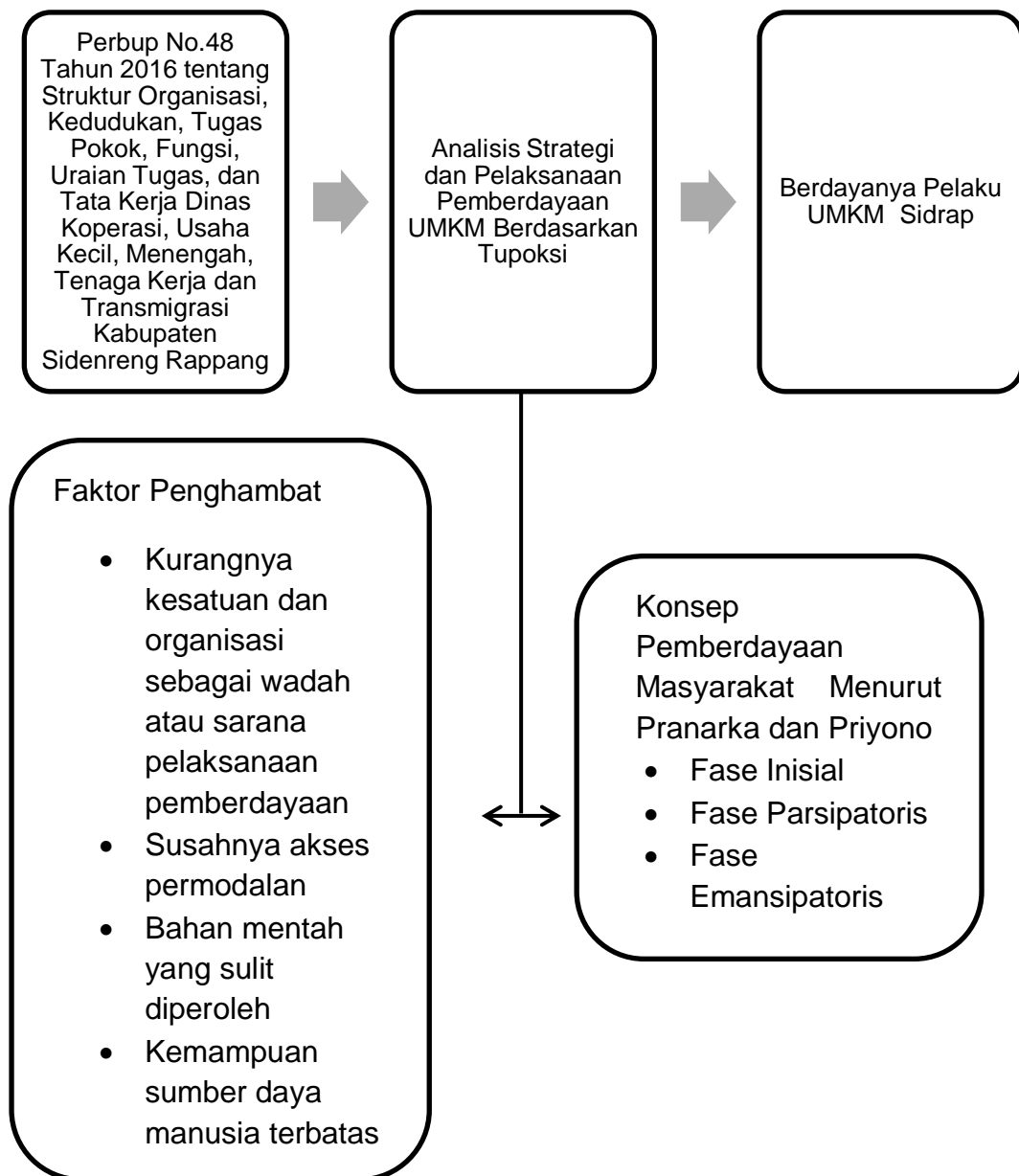
Pemberdayaan yang dimaksud adalah proses untuk mengaktualisasikan potensi manusia dengan tujuan agar dapat terpenuhi kehidupan sesuai harkat dan martabat manusia, di dalamnya terkandung tiga nilai yaitu kelestarian hidup, harga diri, dan kebebasan. Salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga menikmati hasil.

Menurut Pranaka dan Priyono (1996) proses pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Pada fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini masyarakat bersifat pasif,

melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung kepada pemerintah. Pada fase partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika fase emansipatoris, proses pemberdayaan berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan oleh pemerintah. Pada fase ini masyarakat sudah menemukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasikan diri.

Berdasarkan penjelasan tentang kerangka berpikir sebelumnya, maka peneliti membuat model kerangka pemikiran atau model konsep berpikir dalam penelitian sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Berpikir



G. Definisi Operasional

Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Strategi : Menurut Kenneth R. Andrews, strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang sesuai kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan. Pada dasarnya, perusahaan menetapkan strategi melalui penyelarasan kemampuan perusahaan dengan peluang yang ada dalam industri.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang : merupakan salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang berada di setiap daerah di Indonesia, salah satunya adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi ini memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yaitu bidang Koperasi dan UMKM.

3. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
7. Industri pandai besi merupakan suatu usaha perorangan yang bergerak dibidang pertukangan besi. Seseorang yang menunjukkan perannya dan terbukti kemahirannya, biasanya diakui pakar di dalam bidang tersebut.

8. Konsep mengenai fase pemberdayaan masyarakat menurut Pranarka dan Priyono :

a. Fase Inisial : Proses pada tahap inisial adalah berasal dari pemerintah, oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi rakyat. Peran pemerintah pada tahap inisial sangat terasa, terutama dalam memberikan pelatihan, penyuluhan dan bantuan kepada para pengusaha. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertanggung jawab dalam memberdayakan UMKM yang ada. Adapun yang menjadi indikator dalam proses pemberdayaan pada tahapan ini, yaitu :

- ❖ Pelatihan. Pelatihan adalah investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera menggunakannya dalam pekerjaan. Pada dasarnya pelatihan dilakukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menempati posisi baru.
- ❖ Penyuluhan. Penyuluhan adalah penyampaian informasi kepada pekerja atau masyarakat terkait dengan program kerja baru atau mengenai fasilitas baru sehingga tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program.

❖ Kebijakan. Ultimatum atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait untuk mengatur program kerja dari tiap divisi atau organisasi dibawahnya agar tidak bertentangan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Kebijakan ini bisa berupa bantuan modal, kelengkapan sarana dan prasarana.

b. Fase Partisipatoris : Pada tahap partisipatoris, proses pemberdayaan pada dasarnya dari pemerintah bersama rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada tahap ini peran pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menuju kemandirian. Para pelaku UMKM diikutsertakan dalam memecahkan kendala-kendala yang dihadapi. Fase ini baru bisa dilaksanakan ketika fase pertama telah menampakkan hasil yang sesuai dengan harapan.

c. Fase Emansipatoris : Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam dirinya untuk mengembangkan koperasi mereka sendiri. Oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan UMKM ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari Dinas

terkait. Kondisi dari UMKM saat ini belum bisa menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari pelaku usaha yang ada masih belum menemukan kemampuannya untuk untuk memberdayakan usaha mereka sendiri dilihat dari semakin berkurangnya pelaku UMKM, khususnya pengrajin pandai besi di Kecamatan Tellu Limpoe. UMKM yang kreatif adalah usaha yang mampu mempertahankan dirinya sendiri meski tanpa tekanan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. UMKM bisa menciptakan ide-ide kreatif dan inovasi yang belum terpikirkan oleh Dinas terkait. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus selalu memberi dukungan kepada para pelaku usaha agar mampu mencapai fase in

H. Kajian Terdahulu

Berikut ini dideskripsikan dalam Tabel II.3 tentang beberapa penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Tabel II.3 Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode analisis	Hasil penelitian
1	Maulida Rusdiana 2016	Strategi Dinas Koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo untuk Meningkatkan daya saing UMKM batik pada sentra UMKM kampoeng Batik Jetis Sidoarjo	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif dengan strategi studi kasus dengan teknik penentuan informan secara <i>purposive sampling</i> dan <i>snowball sampling</i> . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.	Strategi yang digunakan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM adalah strategi pemberdayaan pasar dan dioperasionalkan dengan strategi fungsional. Strategi tersebut diimplementasikan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Memberikan pelatihan tentang pemasaran, mengikutsertakan dalam pameran, promosi, dan misi dagang serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan bantuan modal untuk menguprade kondisi factor

				<p>Mengenalkan dan memberikan informasi kepada konsumen melalui berbagai kegiatan pameran, promosi, dan misi dagang serta menetapkan kebijakan wajib batik kepada pegawai instansi pemerintah untuk meng-<i>upgrade</i> kondisi permintaan.</p> <p>Melakukan promosi melalui pameran dan media baik cetak maupun elektronik dalam kaitannya dengan industry terkait dan industry pendukung</p> <p>Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain Bank Jatim sebagai mitra dalam pemberian dana bergulir, Maskapai Lion Air sebagai salah satu mitra dalam publikasi, dan bersama Bappeda melakukan kerjasama dengan konsultan dari Belanda dalam pendampingan UMKM</p>
--	--	--	--	---

2	Senen Machmud dan Iwan Sidharta 2013	Model Kajian Pendekatan Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Sektor UMKM di Kota Bandung	Pada penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif. Dimana penulis menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan.	Perkembangan usaha kecil menengah (UMKM) di Kota Bandung dapat dilakukan dengan pendekatan staregik dengan mengkaji terlebih dahulu factor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah (UMKM) kemudian melakukan analisis terhadap keunggulan UMKM dan kesuksesan UMKM kemudian dilakukan analisis SWOT kelemahan, yang pada akhirnya dilakukannya suatu rumusan konsep pemberdayaan UMKM dan tujuan serta sasaran yang ingindicapai sehingga diperoleh strategi pemberdayaan UMKM dengan mengeluarkan suatu kebijakan mengenai perkembangan UMKM, program pemberdayaan UMKM, dan kegiatan pemberdayaan UMKM
---	--------------------------------------	---	--	--

3	Suci Astari 2019	Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Langkat Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan metode pengumpulan data dari primer dan data sekunder oleh peneliti kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat. Melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan, melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi, serta melakukan teknik analisis SWOT	Strategi Perkuatan, Strategi Perkuatan yang di lakukan oleh Dinas Koperasidan UMKM Kabupaten Langkat di implementasikan dalam Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dengan melakukan Promosi Produk. Strategi pemberdayaan, Strategi pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasidan UMKM Kabupaten Langkat dengan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Strategi Perlindungan, Strategi Perlindungan Dinas Koperasidan UMKM Kabupaten Langkat dilaksanakan dalam program penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM. Program inidilakukan dengan memberikan Bantuan Hibah.
---	---------------------	--	---	---

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Maulida Rusdiana dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada pemberdayaan UMKM batik. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan pada sisi pemberdayaan usaha oleh pemerintah

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Senen Machmud dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah penelitian terdahulu membahas Model Kajian Pendekatan Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Sektor UMKM sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang pemberdayaan dalam sektor UMKM

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suci Astari dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah penelitian terdahulu membahas pemberdayaan UMKM di Kabupaten Langkat sedangkan penelitian ini membahas pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM selaku pihak pemerintah.